

MEMAHAMI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA DAN KONTRIBUSI POLISI MILITER UNTUK MENINGKATKAN IPK

Adi Heryadi⁽¹⁾, Ilham B Tarigan⁽²⁾, Weni Astuti⁽³⁾

Prodi Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
adiheryadi16@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's Corruption Perceptions Index score in 2020 is a reflection of public perceptions that were the object of the survey during 2020. Data released by Transparency International Indonesia in January 2021 placed Indonesia with a GPA score of 37/100, down 3 points from 2019 which was 40/100. From the various aspects surveyed, some have decreased and some have stagnated. World Justice Project-Rule Of Law Index, which is an indicator that measures public authority in the executive, legislative, and police/military (Suyatmiko (2021) is a score that has increased. Indonesia's corruption perception index score 2020 and how the contribution of the Military Police contributes to boost the score Indonesian GPA for the honor and honor of the nation in the eyes of the international community Service activities will be held on December 28, 2021 at the Denpom IV/2 Yogyakarta Headquarters Jalan Magelang KM 5.5 Mlati, Sleman, DIY. Participants in this activity are 20 (twenty) members of Denpom IV /2 Yogyakarta from the enlisted, non-commissioned, to officer levels. However, 19 participants followed through to the end of the evaluation and evaluation activities using the lecture and discussion method. It was found that 53% of participants really understood the material on the Indonesian Corruption Perception Index, as many as 37% quite understood and do not understand 10%. Participants are also able to help understand as members of the Military Police to improve their p increase in GPA scores from carrying out main tasks and as a member of the Police.

Keywords: *corruption perception index, military police, military psychology, psychology of corruption*

ABSTRAK

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2020 merupakan cerminan persepsi publik yang menjadi objek survey selama tahun 2020. Data yang dirilis oleh Transparency International Indonesia pada Januari 2021 menempatkan Indonesia dengan skor IPK 37/100 atau turun 3 point dari tahun 2019 yaitu 40/100. Dari berbagai aspek yang di survey, ada yang mengalami penurunan dan ada yang stagnan. *World Justice Project- Rule Of Law Index* yaitu Indikator yang mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi/militer (Suyatmiko (2021) adalah skor yang mengalami peningkatan. Tim pengabdian bersama anggota Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta mencoba membedah skor indeks persepsi korupsi Indonesia 2020 dan mendiskusikan bagaimana kontribusi Polisi Militer untuk ikut mendongkrak skor IPK Indonesia untuk kehormatan dan martabat bangsa di mata internasional. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 28 Desember 2021 di Markas Denpom IV/2 Yogyakarta Jalan Magelang KM 5,5 Mlati, Sleman, DIY. Peserta pada kegiatan ini adalah 20 (dua puluh) orang anggota Denpom IV/2 Yogyakarta dari jenjang tamtama, bintara, hingga perwira. Namun yang mengikuti hingga akhir kegiatan dan mengisi lembar evaluasi adalah 19 peserta dengan metode ceramah dan diskusi. Hasil yang diperoleh, 53% peserta sangat paham dengan materi tentang Indeks

Persepsi Korupsi Indonesia, sebanyak 37% cukup paham dan kurang paham 10%. Peserta juga mampu mengidentifikasi perannya sebagai anggota Polisi Militer untuk berkontribusi terhadap peningkatan skor IPK dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota Polisi Militer.

Kata Kunci: indeks persepsi korupsi, polisi militer, psikologi militer, psikologi korupsi.

PENDAHULUAN

Heryadi, dkk (2021) mensinyalir bahwa Fenomena korupsi di Indonesia masih memprihatinkan, korupsi berjenjang dari mulai pejabat tinggi negeri hingga terendah masih merajalela. Semakin gencar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberantas korupsi, semakin terbuka pula fakta-fakta mengejutkan akan korupsi. Tidak hanya upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai operasi tangkap tangan (OTT), kampanye anti korupsi, penandatanganan fakta integritas, dan upaya pencegahan lainnya nampaknya memang belum terlalu memberi dampak atau efek jera bagi para koruptor. Fenomena ini kemudian bisa kita lihat dari nilai indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 yang menurut Heryadi dan Madjid (2021) mengalami penurunan 3 *point* dari skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2019 yang berada di angka 40 di tahun 2020 menjadi 37.

Skor IPK ini menempatkan Indonesia turun peringkat dari 85 menjadi 102 dari 180 negara di dunia yang menjadi objek survey. Skor indeks persepsi korupsi ini bernilai 0 – 100, angka 0 menunjukkan negara paling korup dan angka 100 adalah negara paling bersih. Indikator yang menjadi objek survey lembaga internasional tersebut adalah seputar ekonomi dan investasi, penegakan hukum dan politik serta demokrasi. Posisi kita sebagai bangsa yang memprihatinkan ini tidak bisa membuat kita hanya berdiam diri, sudah semestinya pendidikan kita ikut berkontribusi mencegah korupsi yang pada akhirnya akan menempatkan bangsa ini pada posisi terhormat di mata internasional.

Data indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2019 dan 2020 secara lebih detail terdapat 5 indikator yang mengalami penurunan, 3 indikator stagnan atau tetap dan 1 indikator yang mengalami kenaikan (Suyatmiko, 2021). Selengkapnya data tersebut bisa di lihat di bawah ini:

Tabel 1. Indikator Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Indikator	2020	2019
<i>PRS International Country Guide</i>	50	58
<i>IMD World Competitiveness Yearbook</i>	43	48

Indikator	2020	2019
<i>Global Insight Country Risk Ratings</i>	35	47
<i>World Economic Forum EOS</i>	46	46
<i>Bertelsmann Foundation Transform Index</i>	37	37
<i>Economic Intelligence Unit Country Ratings</i>	37	37
<i>PERC Asia Risk Guide</i>	32	35
<i>Varieties of Democracy</i>	26	28
<i>World Justice Project – Rule of Law Index</i>	23	21

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa sebagian besar indikator terjadi penurunan yang signifikan. Dari sejumlah indikator penyusun CPI 2020 terdapat lima sumber data yang merosot dibanding temuan tahun 2019 lalu. Indikator-indikator tersebut adalah *pertama*, *PRS International Country Risk Guide* mengalami penurunan hingga 8 poin. PRS adalah penilaian korupsi dalam sistem politik. Bentuk korupsi paling umum yang dihadapi langsung oleh bisnis adalah korupsi keuangan dalam bentuk permintaan pembayaran khusus dan suap yang terkait dengan izin impor dan ekspor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polis atau pinjaman.

Kedua, *IMD World Competitiveness Yearbook* juga mengalami penurunan 5 poin. IMD ini mengukur daya saing suatu negara dan menentukan bagaimana situasi social politik dan ekonomi suatu negara berpengaruh dalam hal daya saing perusahaan.

Ketiga, *Global Insight Country Risk Ratings* ini menggambarkan tentang korupsi dan dampaknya terhadap operasionalisasi bisnis serta asesmen pengalaman pebisnis dalam proses perizinan dan regulasi pendukung. Dari penilaian ini, kelihatannya salah satu penyumbang terbesar penurunan angka IPK Indonesia yang anjlok 12 poin dari 47 ke 35.

Keempat, *World Economic Forum EOS*, indikator ini mengalami stagnasi pada skor 46. *World Economic Forum EOS* menggambarkan tentang seberapa lazim perusahaan tidak melakukan suap terkait dengan ekspor-impor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, *kickback* kontrak, serta seberapa lazim dana publik dialihkan ke swasta, individu, atau kelompok terkait dengan korupsi.

Kelima, *Bertelsmann Foundation Transform Index*, BFTI yang juga stagnan di angka 37 adalah sebuah indikator yang menilai tentang efektivitas pemidanaan korupsi pada pejabat public serta tingkat keberhasilan dalam mengontrol korupsi dan efektivitas penerapan penegakan integritas pada lembaga public.

Keenam, *Economic Intelligence Unit Country Ratings* ini juga mengalami stagnasi di skor 37 juga. EIU adalah sebuah indikator yang sangat komprehensif yang mengukur tentang

ketersediaan prosedur dan akuntabilitas yang jelas dan mengatur alokasi dan penggunaan dana publik. *Ketujuh, PERC Asia Risk Guide indikator* ini mengalami penurunan sebesar 3 poin. PERC membuat berbagai laporan risiko di negara-negara Asia. PERC mengukur tentang bagaimana penilaian para pebisnis terhadap masalah korupsi di negara tempat mereka beroperasi (PERC, 2018).

Kedelapan, Varieties of Democracy, indikator ini mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara, yakni elektoral, liberal, partisipatif, deliberatif, egalitarian, majoritarian, dan konsensual. Skor V-Dem turun 2 poin.

Kesembilan, World Justice Project- Rule of Law Index. Dalam WJPROL salah satu yang diintegrasikan adalah indikator “Ketiadaan Korupsi”. Indikator ini mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi/militer (WJP – ROL, 2020).

Dari data tersebut terlihat bahwa Satu-satunya indikator yang mengalami peningkatan adalah *World Justice Project- Rule Of Law Index* yaitu Indikator yang mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun polisi/militer (Suyatmiko (2021).

Menurut Heryadi, dkk (2020) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memiliki tugas pokok untuk menegakkan dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas-tugas tersebut kemudian dibagi menjadi tugas matra darat dalam operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP),

Sebagai bagian dari TNI AD, Polisi Militer TNI Angkatan Darat mempunyai fungsi penegakan disiplin, hukum dan ketertiban di lingkungan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai penegak Kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembinaan kecabangan, pendidikan dan latihan, pembinaan penyelidikan dan pengamanan fisik, pembinaan penyidikan, pembinaan pengawalan, pembinaan tahanan militer merupakan fungsi utama dari Pusat Polisi Militer TNI AD (www.tniad.mil).

Reformasi secara terus menerus yang dilakukan oleh TNI simultan dengan yang dilakukan oleh TNI AD khususnya, Membongkar kasus korupsi di lingkungan TNI AD seperti yang disampaikan KASAD baru-baru ini sebagai perwujudan serius pimpinan TNI

AD untuk ikut memberantas korupsi (www.cnnindonesia.com). Berbagai kasus korupsi di lingkungan TNI sudah mulai secara transparan di buka ke public, hal ini menurut penulis sangat berdampak pada citra TNI AD khususnya untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi seperti yang tercermin dalam skor IPK di atas.

Sebagai bentuk kepedulian akademisi pada upaya pencegahan korupsi khususnya menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan nilai IPK indonesia pada tahun-tahun mendatang penulis telah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Dialog dan Diskusi “Memahami Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dan Kontribusi Polisi Militer Untuk Meningkatkan IPK” bersama anggota Polisi Militer DenPom IV/2 Yogyakarta dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Indeks Persepsi Korupsi kepada anggota Denpom IV/2 Yogyakarta.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menerapkan beberapa metode yaitu:

1. Ceramah

Metode ceramah dilakukan untuk menyampaikan materi seputar

- a. Indeks persepsi korupsi Indonesia 2020
- b. Persepsi Anti Korupsi, apa dan bagaimana membangunnya serta kontribusi Polisi Militer untuk meningkatkan skor IPK.

2. Dialog dan Diskusi

Dalam dialog dan diskusi ini, para peserta di ajak berdiskusi tentang

- a. Indeks persepsi korupsi Indonesia 2020
- b. Persepsi Anti Korupsi, apa dan bagaimana membangunnya.
- c. Tanya jawab bagaimana kontribusi Polisi Militer untuk ikut meningkatkan skor IPK Indonesia.

3. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 08.00 – 11.00 WIB, bertempat di Markas Denpom IV/2 Yogyakarta, Jln Magelang KM 5,5 Mlati, Sleman, DIY. Peserta pada kegiatan ini adalah 20 (dua puluh) orang anggota Denpom IV/2 Yogyakarta dari jenjang tamtama, bintara, hingga perwira. Namun yang mengikuti hingga akhir kegiatan dan mengisi lembar evaluasi adalah 19

peserta.

4. Tim Pengabdian dan Pembagian Tugas

Tim pengabdian pada kegiatan ini terdiri dari 1 orang dosen dan 2 orang mahasiswa dari Prodi Psikologi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu,

- a. Adi Heryadi, S. Psi., M. Psi., Psikolog, selaku ketua tim pengabdian yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses. Pada saat pelaksanaan kegiatan ketua tim pengabdian bertindak sebagai nara sumber atau pemateri.
- b. Weni Astuti, selaku anggota tim pengabdian mahasiswa bertanggung jawab terhadap ketersediaan dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan pengabdian. Pada pelaksanaan kegiatan bertindak sebagai moderator acara.
- c. Ilham B Tarigan, selaku anggota tim pengabdian mahasiswa bertanggung jawab terhadap proses perijinan dan komunikasi dengan mitra pengabdian dan saat pelaksanaan kegiatan bertindak sebagai seksi dokumentasi dan evaluasi kegiatan.



Gambar 1. Sesi Absensi Peserta



Gambar 2. Sesi Sambutan dari DanDenpom IV/2



Gambar 3. Sesi Penyampaian Materi



Gambar 4. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab



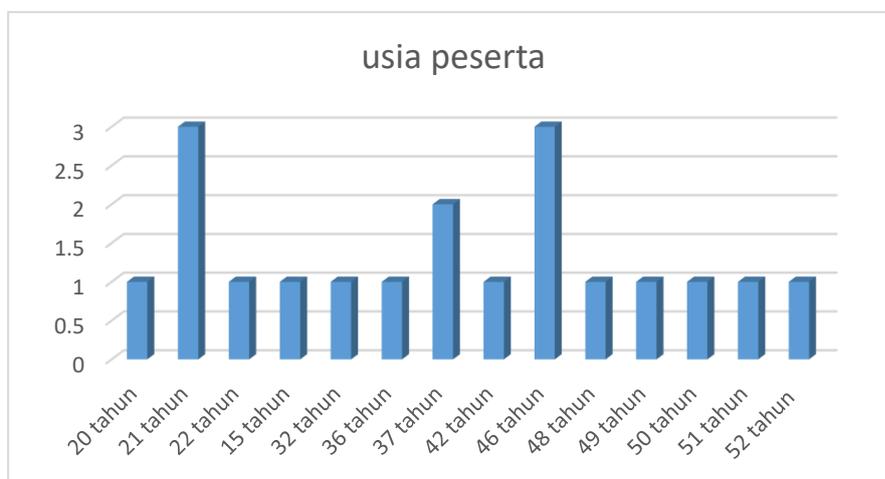
Gambar 3. Sesi Foto Bersama



Gambar 4. Sesi Foto Bersama

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan di ikuti oleh 20 peserta anggota Denpom IV/2 Yogyakarta namun yang sampai selesai dan mengisi angket evaluasi hanya 19 peserta. 1 peserta mohon ijin ditengah acara karena ada penugasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Sebaran usia peserta kegiatan terlihat pada table di bawah ini.

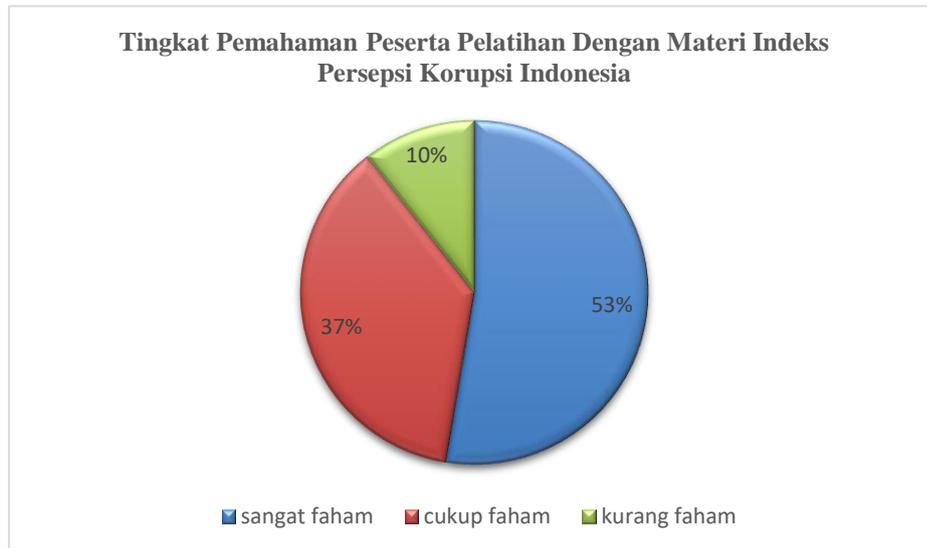


Gambar 7. Usia Peserta Pelatihan

Materi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020 telah disampaikan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang dilakukan dengan *active learning*. Semua peserta telah aktif dalam dialog dan diskusi. Setelah selesai kemudia dibagikan lembar evaluasi untuk melihat tingkat pemahaman peserta akan materi, pemahaman peserta akan pentingnya persepsi anti korupsi dan bagaimana menurut peserta kontribusi Polisi Militer untuk meningkatkan skor indeks persepsi korupsi indonesia dalam konteks tugas dan peran mereka

sebagai anggota polisi militer.

Dari hasil evaluasi diperoleh data bahwa peserta sangat paham dengan materi tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak 53% cukup paham dengan materi tentang Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebanyak 37%, dan kurang faham 10%.



Gambar 8. Tingkat Pemahaman Peserta Pelatihan dengan Materi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Selain itu tingkat pemahaman peserta akan pentingnya persepsi anti korupsi dalam mencegah korupsi di Indonesia sangat paham sebanyak 58%, Cukup paham 37% dan Kurang paham sebanyak 5%.



Gambar 9. Pemahaman Peserta akan Pentingnya Persepsi Anti Korupsi dalam Mencegah Korupsi di Indonesia

Ketika diajukan pertanyaan terbuka tentang bagaimana kontribusi Polisi militer untuk meningkatkan skor IPK dikaitkan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota Polisi Militer diperoleh jawaban sebagai berikut. Sebanyak 7 anggota Polisi Militer menyatakan jangan berfikir mau korupsi apalagi melakukan korupsi dalam bentuk apapun dan beberapa peserta mengatakan bekerja dengan jujur ikhlas berani semangat. Dan tidak sedikit peserta yang menyatakan perkara korupsi dimulai dari penyelidikan untuk dibuat BAP yang akan dilanjutkan dengan peran Polisi Militer sangat penting untuk membuat terang suatu perkara dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dengan tidak menyalahgunakan wewenang, melaksanakan tugas sesuai prosedur, dan ada juga yang mengatakan korupsi harus diberikan hukuman maksimal.

Sebagian peserta juga menyatakan bahwa penegakkan hukum secara adil sebagai upaya nyata meningkatkan nilai indeks persepsi, upaya lain yang bisa dilakukan menurut peserta adalah dengan melaksanakan penegakkan hukum sesuai dengan perkaranya, tidak memanipulasi hukum yang ada dengan cara bertugas dengan baik mengayomi masyarakat dan bersama membangun bangsa agar kedepannya lebih baik lagi. Peserta lain juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi bisa dengan cara meningkatkan supremasi hukum agar adil dan bijaksana.

Peserta yang lain juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi bisa dimulai dari memberantas korupsi di Indonesia khususnya di lingkungan TNI, dan penegakkan hukum di jajaran TNI. Harus faham dan mengerti tentang hukum, harus terbuka dan tidak menyalahgunakan tanggung jawab sebagai penyelidik, jujur dan adil.

Secara umum dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kategori sangat paham peserta akan topik utama berupa indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 dan pemahaman akan persepsi anti korupsi berada di level 55-60%, sisanya masih ada peserta yang hanya cukup paham dan kurang paham akan materi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah

1. Sebagian besar peserta atau kurang lebih 60% sangat memahami tentang indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 dan juga sangat memahami pentingnya persepsi anti korupsi untuk ikut berkontribusi pada peningkatan skor indeks persepsi korupsi.

2. Peserta telah mampu mengidentifikasi berbagai perannya secara langsung sebagai anggota Polisi Militer yang mempunyai tugas dan fungsi penegakan hukum di lingkungan TNI AD untuk ikut berkontribusi pada proses pemberantasan maupun pencegahan korupsi yang secara tidak langsung akan ikut meningkatkan skor indeks persepsi korupsi Indonesia.

Adapun saran yang dapat diberikan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya diperluas populasi militer lain yang dapat dijangkau dalam upaya mendukung setiap upaya pencegahan korupsi, peningkatan nilai indeks persepsi korupsi khususnya dan pengembangan kajian psikologi militer pada umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada komandan Denpom IV/2 Yogyakarta yang telah memberikan dukungan pada kegiatan ini dan bersama-sama berkontribusi pada upaya peningkatan nilai indeks persepsi korupsi Indonesia dalam kaitannya dengan tugas pokok Polisi Militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Heryadi, A., Jayanti, A. M., Bantam, D. J. (2020). Pelatihan Konseling Dasar Bagi Komandan Regu Yonif 403/WP. *Jurnal Dharma Bakti-LPPM IST AKPRIND*, 3(2).
<https://ejournal.akprind.ac.id/index.php/dharma/article/view/3101>
- Heryadi, A., Madjid, A. (2021). Girl Selling Milk: Storytelling of Teaching The Islamic Honesty Value. *Proceeding International Conference on Islamic and Global Civilization*, 63-70
<http://conference.unisma.ac.id/index.php/iconigc/IConIGC/paper/view/1213>
- Heryadi, A., dkk (2021). Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Sejak Anak Usia Dini Bagi Anggota Kowad Korem 072 Pamungkas. *Gervasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5(2), 230-241. DOI: <http://dx.doi.org/10.31571/gervasi.v5i2.2302>
- Suyatmiko, W, H., 2021. Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7(1), 161-178. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>

www.cnnindonesia.com

www.tniad.mil